

PENETRASI NEGARA DI DANAU TOBA (Studi Kasus Pengembangan Destinasi Pariwisata di Danau Toba)

Sarmina Purba, Tito Handoko

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*

Email: purbasarmina2@gmail.com, titohandoko@lecturer.unri.ac.id

Abstract

In accordance with the data obtained that mentions that Lake Toba belongs to the KSPN (strategic area of national tourism), it is necessary to take coordinated, systematic, directed and integrated measures so that the need for an action aimed at accelerating development with a policy called state penetration. The purpose of this research is to know what is an obstacle to the development of Lake Toba as a leading tourist destination on a national and international scale and to know the efforts that need to be made, especially the implementing body of the lake toba authority (BPODT) in addressing the problems that become obstacles to Lake Toba as a priority tourist destination. This study uses qualitative approach with descriptive method.

The results of research on the penetration of the country in order to accelerate the development of lake toba tourism is a manifestation of the potential seen if Lake Toba can be used as a priority tourism even super priority on an international scale. The obstacles encountered by BPODT are land ownership issues and the community is less participating in accelerating development. The efforts made by the Lake Toba Authority (BPODT) are to improve authoritative and coordinated functions.

Keywords : Country Penetration

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keindahan alam, flora dan fauna serta beraneka ragam budaya, yang semua dapat memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata. Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Gejala pariwisata sendiri telah ada semenjak adanya perjalanan manusia dari suatu tempat ke tempat lain dan

perkembangannya sesuai dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Semenjak itu pula ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi selama perjalanannya, di samping juga adanya motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya, tujuannya untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi. Atau pariwisata bisa di artikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang kemudian kembali ke tempat awal.

Ada dua urusan pemerintah, yaitu : pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah urusan pilihan konkuren.

Peran pemerintah dalam pembangunan salah satunya adalah menciptakan institusi yang kuat dan mendukung aktivitas berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Kebijakan yang tepat dapat memaksimalkan peran para pelaku pembangunan sehingga lebih efisien serta tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan pembangunan juga ditandai dengan bergeraknya perekonomian masyarakat, wilayah, hingga bertujuan untuk memberantas kemiskinan. Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan *incentive* dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan banyaknya objek wisata yang tersebar di banyak kota dan kabupatennya. Salah satunya adalah Kabupaten Toba Samosir yang bukan hanya dikenal di Indonesia namun sampai ke negara lain, salah satu yang terkenal dari Sumatera Utara khususnya kabupaten Toba Samosir adalah objek wisata Danau Toba. Danau Toba merupakan sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Nias yang banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Danau Toba dikelilingi beberapa kabupaten, bukan hanya kabupaten Toba Samosir saja tetapi juga Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Dairi. Danau Toba memiliki luas sekitar 369.854 Ha.

Selain kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan juga memiliki berbagai potensi wisata alam dan budaya yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan kepariwisataan. Dari segi wisata alam, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu dari tujuh kabupaten yang memiliki Danau Toba, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau Toba saat ini juga sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional sehingga sangat potensial bagi pengembangan geowisata. Lokasi wisata yang sering dikunjungi adalah Sipinsur dan Baktiraja. Wisata penatapan ke Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di kabupaten Humbahas. Salah satu objek wisata yang sudah dikenal dunia, namun minim perhatian selama ini adalah Danau Toba. Beruntung di masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI, Danau Toba mendapat perhatian khusus dalam program pengembangan wisata Indonesia. Tentu perhatian orang nomor satu di Indonesia ini akan membenarkan Danau Toba disambut positif masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara tempat Danau Toba berada. Kehadiran Presiden Jokowi berkali-kali ke Danau yang memiliki kedalaman ratusan meter itu membawa semangat baru bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya bagi warga yang bermukim di 7 Kabupaten sebagai kawasan Danau Toba.

Namun dalam rangka pembangunan ini, ada beberapa permasalahan yang menghambat percepatan pengembangan Danau Toba menjadi destinasi unggulan. Permasalahan yang di temukan diantaranya adalah permasalahan lingkungan hingga sikap dan kebijakan pemerintah daerah setempat menjadi faktor penghambat utama pembangunan di Kawasan Danau Toba.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang “Penetrasi Negara Di Danau Toba (Studi Kasus Pengembangan Destinasi Pariwisata di Danau Toba)”.

Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana dampak penetrasi negara terhadap pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba?
2. Apa yang menjadi penghambat pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapat tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh apa yang di hasilkan dengan adanya penetrasi negara terhadap pariwisata Danau Toba.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat sulitnya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan berskala nasional maupun internasional.

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu
 - Rotua Kristin Simamora, Rudi Salam Sinaga (2016) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara”
 - Benni Olan Hutapea (februari 2017) dengan judul “ Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata

Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

- Taufik Wal Hidayat, Irwan Nasution (2019) dengan judul “Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO”
- Miranda Wulandari Mantouw (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”
- Ryan Bobby (2017) dengan judul “Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba”
- Cynthia Faustina (2019), dengan judul “Analisis kelayakan pengembangan ekowisata pada kawasan wisata alam Sipinsur di desa Pearung kecamatan Paranginan Humbang Hasundutan”

Landasan Teori

Kata penetrasi dalam Bahasa Inggris *penetration* berasal dari kata Latin *penetrare*, yang menggabungkan *penes* (“*inside*”) dan *intrare* (“*to enter*”). Kata tersebut paling sering diartikan dengan menembus untuk menggambarkan masuk atau meresap. Penetrasi juga dapat berarti menguraikan atau memahami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Penetrasi artinya penembusan, penerobosan, atau perembesan. Contohnya yaitu ‘penetrasi kebudayaan luar mempengaruhi daerah itu’.

Dalam tulisan ini, penetrasi negara diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara dalam rangka merumuskan dan menegakkan aturan permainan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan kemasyarakatan baik secara horizontal maupun vertikal atau teritorial (Patji, 2004),. Tulisan ini berfokus mengungkap bagaimana negara memainkan pola penetrasinya melalui kelembagaan formal, undang-undang, kebijakan, dan proses politik dalam relasi negara terhadap

pariwisata Danau Toba di era otonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan. Alasan penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan adalah untuk melihat bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan.

III. HASIL PEMBAHASAN

Penetrasi Negara Terhadap Pariwisata Danau Toba

Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas

tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan (Huda, 2014:241).

Pada umumnya organisasi Pemerintah daerah berskala besar, sehingga sebagai konsekuensinya tentu banyak sekali sasaran-sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang harus segera dicapai dalam waktu yang relatif singkat dengan sumber daya yang dimiliki terbatas. Sebagai akibatnya sekalipun ada visi dan misi organisasi yang baik, namun dalam realitanya ternyata tidak menjamin sebuah organisasi mudah untuk dibawa pada sebuah tujuan organisasi yang sudah jelas. Hambatan semacam ini akan menciptakan persoalan tersendiri dan semakin membuat permasalahan dalam jangka panjang bagi sebuah organisasi terutama dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Persoalan-persoalan yang menghambat proses pencapaian tujuan organisasi tersebut pada gilirannya akan memberi peluang terhadap munculnya suatu kebijakan salah satunya negara mengambil keputusan dengan membentuk suatu badan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan yang disebut penetrasi negara. Penetrasi negara yang dimaksud dalam penelitian ini berada di bidang pariwisata yaitu objek wisata Danau Toba.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat begitu pula sebaliknya apapun yang terjadi di pusat akan berdampak di daerah. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terputus.

Penetrasi Negara Pariwisata Danau Toba maksudnya adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara ataupun daerah dalam merumuskan dan menegakkan

aturan permainan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah pusat untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dalam mekanisme pasar. Dengan adanya penetrasi negara tentu membawa dampak terhadap percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba terdapat banyak kemajuan atau peningkatan baik infrastruktur bangunan, objek wisata maupun peningkatan kunjungan wisata. Bagi perekonomian sendiri Pengembangan wisata ini merupakan sebuah strategi untuk mengurangi angka kemiskinan atau menambah pendapatan masyarakat yang berada di sekeliling lingkaran toba.

Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Danau Toba merupakan danau alami terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia, yang berada di kaldera gunung berapi super. Danau ini memiliki panjang 100 kilometer, lebar 30 km dan kedalaman 1600 meter. Danau ini terletak di tengah pulau Sumatera Utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900m. Danau Toba termasuk dalam 5 destinasi superprioritas sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tertulis dalam Buletin Sinergi edisi-44 oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.

Lima destinasi super prioritas yang menjadi fokus kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (kemenparekraf) adalah yakni Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba. Kelima objek wisata tersebut memiliki keindahan, keunikan tersendiri dan panorama alam yang mampu menarik para turis lokal, turis Asia Tenggara, turis mancanegara dan turis dari negara-negara di dunia. Kemenparekraf menunjuk Danau Toba di provinsi Sumatera Utara sebagai ikon baru pariwisata Indonesia berbasis keindahan alam.

Sejarah yang membuktikan bahwa Danau Toba bagian dari letusan gunung Toba yang sangat dahsyat lebih kurang dari 74.000 tahun yang lalu yang mungkin dapat dijadikan sebagai warisan taman bumi mengingat peninggalan letusan tersebut masih meninggalkan beberapa keanekaragaman baik itu *geodiversity*, *biodiversity*, dan *culturediversity*. Oleh karena keistimewaan yang dimiliki Danau Toba, maka pemerintah dengan yakin mampu menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisata berskala internasional yang mampu mengubah kehidupan masyarakat di kawasan lingkaran Toba yaitu 7 kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba.

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Keinginan Pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP) berhasil pada bulan Juni 2016, yakni BOP untuk kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang disingkat sebagai BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba). BOP tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Sebagai tindak lanjut atas peraturan presiden tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Ada tiga kata kunci yang diusung keputusan pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Pertama, Koordinasi. Melalui badan ini seluruh dimensi dari sebuah industri pariwisata dapat disinergikan menjadi sebuah paket yang terintegrasi. Kedua, akselerasi. Melalui badan ini pola kerja yang selama ini lambat dan sangat birokratis dicoba dipercepat dengan otorisasi yang tidak saja koordinatif, tetapi juga instruktif. Ketiga, eksekusi. Dengan otoritas tunggal ini, upaya-upaya kompromi antarsektor dan

antarinstansi yang kerap membelenggu keputusan hanya sekadar keputusan akan dapat diatasi. Singkatnya, BPODT dimaksudkan untuk sesegera mungkin mengeksekusi amanat-amanat konstitusi, Nawacita, atau janji-janji politik presiden.

Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki kawasan Danau Toba telah mendorong presiden dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya segera mengonversikannya menjadi sumber penerimaan devisa. Sebagai international geopark warisan sejarah bumi dan turut membentuk peradaban umat manusia, puncak-puncak gunung yang melingkari danau yang luas dan tenang itu adalah komoditas bernilai jual tinggi dan menghasilkan devisa negara. BPODT perlu sejak awal menyadari bahwa Danau Toba dan kawasan sekitar bukan semata-mata obyek alam, melainkan juga obyek kultural. Masyarakat di sekitar memiliki sejarah dan keterikatan dengan alam.

BPODT merupakan satu-satunya BLU dibawah Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memiliki tugas sebagai berikut : Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba (tugas koordinatif); dan Melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di lahan Zona Otorita Danau Toba (tugas otoritatif). Yang menjadi tugas utama Badan Otorita Danau Toba adalah mengelola kawasan pariwisata terintegrasi di lahan seluas 500 hektar. Sesuai Perpres nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, kuota lahan yang diizinkan dikelola oleh BPODT adalah 500 Ha, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan kuota. Harusnya 500 Ha , kondisi sekarang masih 386 Ha yang tersedia, di Sibisa dan Sigapiton, dan untuk

memenuhi kuota tersebut, Kabupaten Dairi sesuai arahan pak Bupati Eddy Berutu mengusulkan untuk melepaskan 160 Ha lokasinya untuk memenuhi dan menyempurnakan kuota tersebut.

Hambatan dan Upaya BPODT dan Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Danau Toba

Berikut hambatan-hambatan tersebut:

1. Hambatan dan upaya BPODT

Secara umum, kesiapan masyarakat di sekitar Danau Toba masih kecil, masyarakat berfikir bahwa pariwisata ini masih lambat dalam mendapatkan upah sedangkan masyarakat menginginkan mendapatkan upah secara cepat atau bahkan secara instan. Dalam pariwisata juga membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengembangan wisata dalam menyediakan atraksi di destinasi wisata, bahkan cendra matapun di beberapa tempat sulit ditemui sehingga mengurangi minat pengunjung yang akan datang ke objek wisata tersebut.

Secara khusus Masalah lahan : masih banyak klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat terhadap lahan otorita, dan menjadi masalah utama BPODT yang sulit ditangani BPODT. Masyarakat Sigapiton masih banyak komplain karena dianggap adanya penggusuran. Pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sigapiton Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba Samosir yang menuai protes dari masyarakat setempat sampai saat ini, dapat berdampak terhadap lambatnya pengembangan kawasan Danau Toba. Desa Sigapiton merupakan satu dari empat desa yang masuk dalam pengembangan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Di desa ini rencananya akan dibangun Toba Caldera Resort. Masyarakat adat sigapiton menilai BPODT tak melibatkan masyarakat kala mau menggunakan lahan.

Meskipun permasalahan tersebut sudah terselesaikan serta memiliki kesepakatan antara BPODT dengan masyarakat setempat, namun informan dari kantor BPODT menyatakan bahwa pengklaiman lahan masih berlanjut sehingga pembangunan wisata masih tertunda karena BPODT masih menyaring konflik kepemilikan lahan yang masih bermasalah.

Upaya yang dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) :

- Mengembangkan fungsi otoritatif dan fungsi koodinatif. Terdapat kewenangan otoritatif badan pelaksana otorita danau toba atau seluas 500 ha di wilayah Toba Samosir yang artinya 500ha dari 30 ribu ha wilayah danau toba menjadi wilayah pengembangan badan otorita danau toba.

- Meningkatkan sumber daya manusia,
- Sedang membuat masterplan yang nantinya akan dibuat bangunan-bangunan untuk menarik investor dan harapannya masyarakat ikut berpartisipasi di sekitar lahan otorita.

2. Hambatan dan upaya Dinas Priwisata

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata
- Konflik kepemilikan lahan di objek wisata
- Belum baiknya aksesibilitas dan konektifitas menuju objek wisata.
- Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran
- Minimnya responsive masyarakat
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di objek wisat, seperti , Jaringan internet, restoran, penginapan (akomodasi),trasportasi, transaksi keuangan (ATM)
- Minimnya fasilitas aktraksi di objek wisata
- Sebagian wilayah objek wisata berkaitan dengan kawasan hutan.

Upaya yang dilakukan dinas pariwisata untuk mengatasi hambatan yang ditemui dinas pariwisata:

- Peningkatan sarana dan prasarana dan fasilitas aktraksi di objek wisata
- Pembinaan dan peningkatan SDM dibidang pariwisata melalui sosialisasi dan pelatihan
- Melakukan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media cetak dan digital
- Menyelenggarakan kalender event dalam rangka meningkatkan antraksi di objek wisata.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder khususnya yang bergerak di bidang pariwisata. Cth: HPI,PHRI, Komunitas pariwisata.

Hubungan Kerja BPODT dengan Pemerintah Daerah

Pembentukan BPODT yang diatur oleh peraturan Presiden No.49 tahun 2016 memberikan hak pengelolaan paling sedikitnya 500 ha lahan untuk dikembangkan menjadi resor wisata terpadu yang dikelola secara professional untuk mengimplementasikan fungsi otoritatif lembaga ini. Selain fungsi otoritatifnya, BPODT juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yaitu secara aktif berkoordinasi dengan setiap pemerintah dari 7 kabupaten di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kewenangan Badan Otorita Danau Toba sejak awal sudah direncanakan tidak boleh berbenturan dengan Undang-undang otonomi daerah sebab sesuai Undang-undang, setiap daerah mempunyai kewenangan yang tidak mungkin bisa diambil alih begitu saja. Pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah kabupaten yang berada di sekitar Danau

Toba dan lembaga pihak terkait terlibat dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang di susun oleh badan pelaksana Badan Otorita Danau Toba. Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail yang disusun oleh badan pelaksana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penetrasi negara dalam rangka mengembangkan wisata Danau Toba ini adalah wujud dari adanya potensi yang dilihat jika Danau Toba dapat dijadikan sebagai wisata prioritas bahkan super prioritas berskala internasional. Danau Toba dapat di percaya dan diyakini dapat membantu pengurangan angka kemiskinan di Sumatera Utara terutama 7 kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dibentuk dengan tujuan mampu mempercepat pembangunan dan pengembangan wisata Danau Toba karena Danau Toba membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang ada. Kewenangan BPODT pada saat ini tidak berkontradiksi dengan kewenangan pemerintah daerah.

Saran

Agar sekiranya pengembangan yang dilakukan terkait dengan objek wisata di Danau Toba dapat terealisasi secepatnya sehingga baik pemerintah, wisatawan dan terlebih lagi masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang besar dari pengembangan yang dilakukan tersebut.

Begitu pula dengan berbagai kawasan obyek wisata yang ada di 7 Kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba atau lingkaran toba dan terutama di Kabupaten Humbang Hasundutan agar lebih dikembangkan lagi sehingga visi misi Bupati Humbang Hasundutan yakni Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul dapat terealisasi. Harapannya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba maupun dinas pariwisata dapat meninjau apa sebenarnya keluhan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata, agar apa yang dilakukan BPODT dan dinas pariwisata terkait pengembangan pariwisata tidak sia-sia. BPODT, Dinas Pariwisata dan masyarakat harus mampu membangun relasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Aceh : Unimal Press
- Hardani,dkk.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : pustaka ilmu, hal.260
- Indira,Dwi Kusumatuti, dkk. 2020. *Sinergitas Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas*. Jakarta Selatan : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementrian PUPR
- Isdarmanto.2017. *Dasar -Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta.
- Lukman. 2013. *DANAU TOBA : Karakteristik Limnologis dan Mitigasi Ancaman Lingkungan dari Pengembangan Keramba Jaring Apung*. Jakarta: LIPI Press.
- Sawena,Ketut dan Gst Ngr Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar*

- Pariwisata*. Denpasar : Pustaka Larasan.
- Samad, Raja Sofyan. 2010. Negara dan Masyarakat : Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru. Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR
- Qodriyatun,Sri Nurhayati, dkk.2018. *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Ekowisata*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt.2.
- Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2025.
- Buaton,Kleofine Widya Sonata dan Heru Purwadio. (2015). Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba Parapat, Sumatera Utara. *TEKNIK ITS*,4(1).
- Nursaidah,Arfianti. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : studi pada dinas pariwisata kota Bandar Lampung. Skripsi : *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Panjaitan, Elfrida dan Nancy Florida Siagian. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perubahan Pola Pikir Masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa. *EK&BI*, 2(2).
- Pardede,Fransiska Rosilla Eva Purnama dan Ida Bagus Suryawan. (2016). Strategi Pengelolaan Kabupaten Samosir Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Provinsi Sumatera Utara. *Destinasi Pariwisata*,4(1).
- RR.E. Anggraeni Eksi Wahyuni. (2014). Sinergi Kemittraan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Di Kabupaten Sleman.
- Widhijanto, Andreas Agung dan Esti Yulitriani Tisnaningtyas. (2018). Identifikasi Kawasan Pemukiman Pendukung : Analisis *Proximity* Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba. *Neo Teknika*, 4(1).
- Wijayanti,Septi Nur. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *MEDIA HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol(23), No (2)
- Yurida,Media. (2019). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Skripsi : *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* .
- Antarasumut. (2019, September 13). Pembinaan Danau Toba Sempurnakan Wisata Indonesia. Diakses pada tanggal 01 juli 2020.

https://sumut-antaranews.com/cdn.ampproject.org/v/s/sumut.antaranews.com/amp/berita/243916/pembenahan-danau-toba-sempurnakan-wisataindonesia?Usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&_js_v=0.1#aoh=15925522720223&_ct=1592552388592&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fsumut.antaranews.com%2Fberita%2F243916%2Fpembenahan-danau-toba-sempurnakan-wisata-indonesia

Digtara.com. (2019, agustus 25). Ini Penghambat Pembangunan Kawasan Danau Toba Versi BPODT. Diakses pada, 01 juli 2020 <https://digtara.com/kabar/ini-penghambat-pembangunan-kawasan-danau-toba-versi-bpodt/>

Hallomedan. (2020, maret 04). Menparekraf Fokus Kembangkan Danau Toba. Diakses 01 juli 2020. <https://hallomedan.co/read/menparekraf-fokus-kembangkan-danau-toba>

Kompas.com. (2020, maret 05). Melihat Masa Depan Danau Toba Sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia. Diakses 01 juli 2020 <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/05/15044561/melihat-masa-depan-danau-toba-sebagai-destinasi-wisata-kelas-dunia>

Medanbisnisdaily. (2015, maret 28). Membenahi Pariwisata Sumut. Diakses 01 juli 2020 <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/28/154878/membenahi-pariwisata-sumut/>